



# Kalbar Ranking 2 SPBE Se-Indonesia

- Midji: Bukti Tata Kelola Pemerintahan Kalbar Terbaik
- Terbuka, Partisipatif, Inovatif, dan Akuntabel

**PONTIANAK, TRIBUN** - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menduduki ranking dua Se-Indonesia, setelah DKI Jakarta atas hasil Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Provinsi tahun 2022.

Hasil evaluasi tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Nomor 108 Tahun 2023 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Ada pun perolehan skor penilaian SPBE Pemprov Kalbar di angka 3,42 atau berpredikat baik berdasarkan hasil evaluasi SPBE di lingkungan pemerintahan tahun 2022. Indeks tersebut menghantarkan Pemprov Kalbar naik tiga peringkat dari urutan lima nasional di tahun sebelumnya.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menjelaskan ini menjadi bukti bahwa tata kelola pemerintahan daerah Kalbar termasuk yang terbaik.



**SPBE di urutan ke-2 dari 38 provinsi ini sangat membanggakan, hanya saja Kalbar kalah dari DKI Jakarta. Target saya tahun ini harus jadi yang pertama, dan saya yakin kita bisa**

**Sutarmidji**  
Gubernur Kalimantan Barat

“Saya berani katakan ini karena MCP penilaian KPK kita urutan 3, untuk survey integritas KPK Kalbar urutan 5. Kemudian penyerapan anggaran urut

■ Bersambung ke l.



## Kalbar Raih Ranking Dua SPBE Se-Indonesia

Sambungan Hal.1

an 4, pendapatan urutan 4 se-Indonesia. Bahkan kalau mau di-score dari sisi belanja dan pendapatan kita yang terbaik," ujarnya, Jumat (3/2).

Sebab daerah yang pendapatannya berada pada urutan satu untuk belanjanya berada urutan 33. Lalu ada yang pendapatan nomor 2 belanjanya urutan 31, yang nomor 3 belanjanya nomor 11.

"Nah kita pendapatan nomor 4 dan belanja kita nomor 4. Banyak lagi prestasi kita di tingkat nasional. Ini semua bukti kinerja jajaran Pemprov yang sudah bagus. Tahun ini saya harap lebih berprestasi dan saya harap tak ada kasus korupsi yang dilakukan ASN Pemprov," tegasnya.

"SPBE di urutan ke-2 dari 38 provinsi ini sangat membanggakan, hanya saja Kalbar kalah dari DKI Jakarta. Target saya tahun ini harus jadi yang pertama, dan saya yakin kita bisa," ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sek-

retaris Daerah Provinsi Kalbar Harisson mengatakan hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

"Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik," ungkapnya.

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan

kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

Dikatakan Harisson bahwa SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.

Selain itu, untuk meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

### Berbasis Elektronik

Sekda Kalbar, Harrison, menjelaskan saat ini penyelenggaraan pemerintahan sudah berbasis elektronik.

"Semuanya sudah berbasis elektronik, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan evaluasi akan menggunakan sistem elektronik," katanya.

Tak hanya itu, ia juga menjelaskan beberapa di antaranya seperti adanya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). "Banyak, misalnya dari perencanaan itu kan kita sudah menggunakan SIPD dan segala macamnya. Termasuk ke dalam pencarian anggaran itu semua sudah menggunakan elektronik," jelasnya.

Dengan adanya SPBE ini agar membuat informasi lebih transparan dan tak bisa dimanipulasi. "Jadi dengan adanya sistem ini sudah tidak bisa menyimpang lagi atau diakali dan itu lebih transparan, juga lebih terbuka," jelasnya.

Untuk itu, ia juga mengatakan masyarakat dapat mengakses itu semua secara online untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintahan yang ada di Kalimantan Barat. (ang/ted)